

POTRET PENDIDIKAN KALIMANTAN TIMUR BERBASIS EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2011

Pramudjono

Dosen FKIP Universitas Mulawarman

Abstrak

Educational Portrait of East Kalimantan based on Self-Evaluation of School/Madrasah, is a picture of education by looking at EDS/M as a benchmark for the success of EDS/M based on 8 SNPs, range from content standards, process standards, the competence of graduating standards, teacher and educational workforce standards, structure and infrastructure standards, management standards, financial standards and assessment standards. Based on the EDS/M, schools can make a 'work plan' or commonly abbreviated by the term of RKS. Data were collected using selection technique, which were chosen based on the target schools of the superintendent. Samples of 497 schools were selected from 14 regency/municipality—the details are as follows; 191 primary schools/MI, 168 junior high schools/M.Ts, 138 senior high schools/vocational high schools/MA. Data analysis with description was meant to see which standards were applicable based on Ministerial Regulations number 19 year 2005, and the average value and mode were meant to see the data that often arise. The research results of EDS/M by regency/municipality are that in general primary schools/MI are at developmental stage 2, but some of them are already in developmental stage 3; Whilst most of the junior high schools/M.Ts. had reached stage 3, even though there are some of them that are still on the second stage; Most of the senior high schools/vocational high schools/MA were already at developmental stage 3 - fulfilled the SNP, but there are two districts that did not meet the SNP. From the findings, it can be concluded that only junior high schools/M.Ts. and senior high schools/vocational high schools/MA that fulfilled SNP, while primary schools/MI was still at developmental stage 2 and haven't achieved the SNP yet. It was also found that the funding standards of all schools in East Kalimantan haven't met the SNP.

Kata kunci : *School Self-Evaluation, National Standard of Education, The minimum standard of service*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) seperti diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang SPMP, satu diantara untuk mengukur mutu sekolah adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS/M). EDS/M

adalah evaluasi internal yang dilakukan sekolah dalam rangka mengetahui kinerja sekolah berdasarkan 8 standar.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009. SPMP mendefinisikan penjaminan mutu sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan/program pendidikan, penyelenggara satuan/program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah (EDS/M). EDS/M sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu belum dilakukan melalui EDS baru dilakukan melalui akreditasi sekolah seperti yang terjadi di lapangan sekolah terdaftar, diakui, disamakan yang selanjutnya diperbarui melalui system akreditasi sekolah. Akreditasi yang dilakukan belum menggunakan standar nasional pendidikan. Sekarang dengan berlakunya EDS/M satuan pendidikan menyelenggarakan penilaian mengenai diri sendiri berbasis SNP, sehingga posisi sekolah dapat diketahui pada tahapan di atas SNP, memenuhi SNP, belum memenuhi SNP dan tidak memenuhi SNP.

Tujuan

Tujuan utama dari hasil Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah (EDS/M) adalah:

1. Pemerintah daerah mengetahui kinerja Sekolah berdasarkan SPM dan SNP.
2. Pemerintah daerah mengetahui tahapan pengembangan dalam pencapaian SPM dan SNP sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan yang bermuara pada peningkatan mutu sekolah.
3. Pemerintah daerah dapat menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) sesuai kebutuhan nyata menuju ketercapaian implementasi SPM dan SNP.
4. Diketahui potret pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten/kota berdasarkan 8 SNP.

Manfaat

Hasil EDS/M diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi sekolah sendiri dan bagi pemerintahan Kab/Kota serta pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola pendidikan.

1. Bagi sekolah
 - a. Sekolah dapat mengidentifikasi kelebihan serta kekurangannya sendiri dan merencanakan pengembangan ke depan.

- b. Sekolah dapat memiliki data dasar yang akurat sebagai dasar untuk pengembangan dan peningkatan di masa mendatang.
 - c. Sekolah dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan yang disediakan, mengkaji apakah inisiatif peningkatan tersebut berjalan dengan baik dan menyesuaikan program sesuai dengan hasilnya.
 - d. Sekolah dapat memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan demi meningkatkan akuntabilitas sekolah.
2. Bagi tingkatan lain dalam sistem (Pemerintah, pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi)
- a. Menyediakan data dan informasi yang penting untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi.
 - b. Mengidentifikasi bidang prioritas untuk memenuhi kebutuhan pencapaian standar nasional pendidikan.
 - c. Mengidentifikasi jenis dukungan yang dibutuhkan terhadap sekolah.
 - d. Mengidentifikasi pelatihan serta kebutuhan program pengembangan lainnya.
 - e. Mengidentifikasi keberhasilan kinerja sekolah berdasarkan berbagai indikator pencapaian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan.

EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)

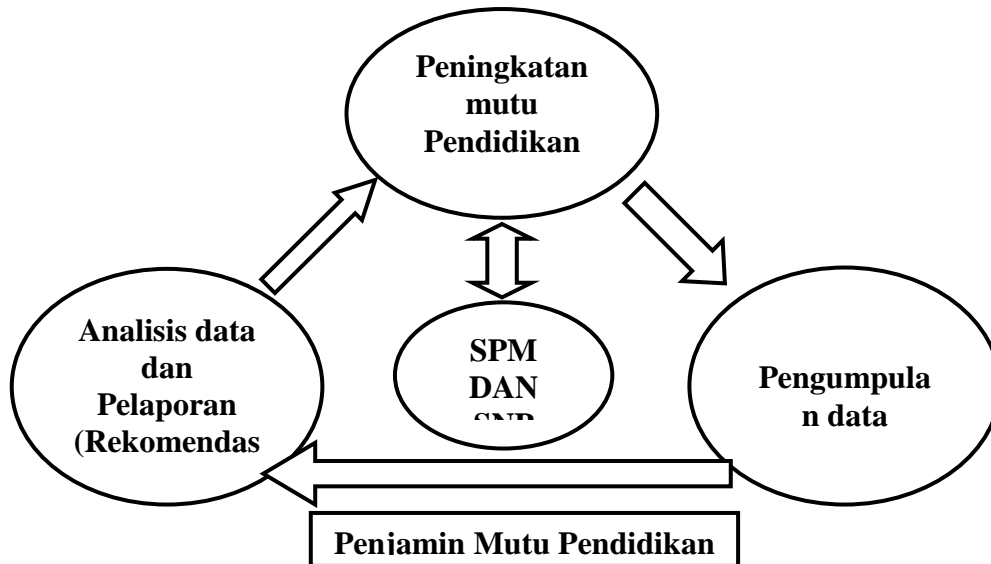
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai dengan Permendiknas No. 63 tahun 2009, untuk terciptanya satu sistem penjaminan mutu pendidikan yang sekaligus juga akan menjadi dasar pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan sehingga akan tercipta "budaya" peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Permen Nomor 63 menjadi acuan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Salah satu komponen utama program SPMP adalah program "Evaluasi Diri Sekolah" atau EDS yang dalam bahasa Inggrisnya disebut "*Supported School Self Evaluation*" (SSSE). Dengan program ini sekolah diminta untuk secara internal melakukan evaluasi sendiri kinerjanya berdasarkan SPM dan SNP. Seperti tersirat dalam istilah Inggrisnya dengan adanya kata "*Supported*", program ini memandang penting adanya "dukungan" penuh pada kegiatan Evaluasi diri ini dari semua unsur dan pemangku kepentingan yang terlibat di sekolah sehingga bukan hanya Kepala sekolah saja yang terlibat tapi juga para guru, Komite Sekolah, wakil orang tua peserta didik serta mendapat bimbingan dari Pengawas Sekolah. Hal ini seperti yang dijelaskan pada Permendiknas nomor 63 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah

daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan

Model di bawah ini mengetengahkan sumber data sistem penjaminan mutu pendidikan :



Gambar 1 : Hakikat Penjaminan Mutu Pendidikan

Konsep Dasar Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah (EDS/M)

Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah adalah EDS/M adalah proses Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SPM dan SNP yang hasilnya dipakai sebagai dasar Penyusunan RKS dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kab/kota.

Proses Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah merupakan siklus, yang dimulai dengan pembentukan Tim Pengembang Sekolah (TPS), pelatihan penggunaan instrumen, pelaksanaan EDS di sekolah dan penggunaan hasilnya sebagai dasar penyusunan RPS/RKS dan RAPBS/RKAS. Sekolah melakukan proses EDS setiap tahun sekali. EDS/M dilaksanakan oleh Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri atas: Kepala Sekolah, wakil unsur guru, wakil Komite Sekolah, wakil orang tua siswa, dan pengawas. Sebagai kerangka kerja untuk perubahan dan perbaikan, proses ini secara mendasar menjawab 3 (tiga) pertanyaan kunci di bawah ini:

1. Seberapa baikkah kinerja sekolah kita? Hal ini terkait dengan posisi pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator SPM dan SNP.
2. Bagaimana kita dapat mengetahui kinerja sekolah? Hal ini terkait dengan bukti apa yang dimiliki sekolah untuk menunjukkan pencapaiannya.
3. Bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja? Dalam hal ini sekolah melaporkan dan menindaklanjuti apa yang telah ditemukan sesuai pertanyaan di nomor 2 dan nomor 3 sebelumnya.

Sekolah menjawab ketiga masalah ini setiap tahunnya dengan menggunakan seperangkat indikator kinerja untuk melakukan pengkajian yang obyektif terhadap kinerja mereka berdasarkan SPM dan SNP yang ditetapkan, dan mengumpulkan bukti mengenai kinerja peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan.

EDS adalah evaluasi internal yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan pendidikan (*stakeholders*) di sekolah untuk mengetahui secara menyeluruh kinerja sekolah dilihat dari pencapaian SPM dan 8 SNP dan mengetahui kekuatan dan kelemahannya secara pasti sehingga akan diperoleh masukan dan dasar nyata untuk membuat RPS/RKS dalam upaya untuk menumbuhkan budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Keterkaitan EDS/M dengan Penjaminan dan Peningkatan Mutu

EDS adalah proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada SPM dan SNP. EDS dilaksanakan oleh setiap sekolah sebagai satu kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan mutu sekolah secara berkelanjutan. EDS merupakan mekanisme evaluasi internal yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama guru, komite sekolah, orangtua, dengan bantuan pengawas. Hasil EDS dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyusun program pengembangan sekolah dan laporan kepada dinas pendidikan tentang pencapaian sekolah untuk pengembangan lebih lanjut.

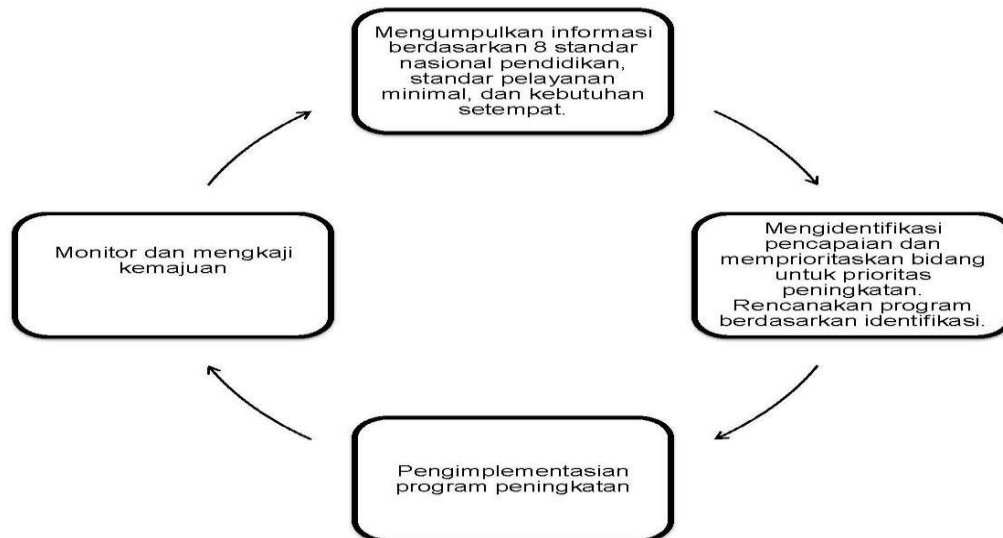
Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah (EDS/M), sebagai komponen penting dalam SPMP, merupakan dasar peningkatan mutu dan penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). EDS/M juga menjadi sumber informasi kebijakan untuk penyusunan program pengembangan pendidikan kabupaten/kota. Karena itulah EDS/M menjadi bagian yang integral dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. EDS/M adalah suatu proses yang memberikan tanggung jawab kepada sekolah untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri dan mendorong sekolah untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu sekolah. Kegiatan EDS/M berbasis sekolah, tetapi proses ini juga mensyaratkan adanya keterlibatan dan dukungan dari orang-orang yang bekerja dalam berbagai tingkatan yang berbeda dalam sistem ini, dan hal ini tentu saja membantu terjaminnya transparansi dan validitas proses.

EDS/M merupakan komponen penentu yang sangat penting dalam membangun sistem informasi pendidikan nasional terutama dalam memotret kinerja sekolah dalam penerapan SPM dan SNP. Informasi yang terbangun menjadi dasar untuk perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pendidikan pada tingkat kab/kota, provinsi, dan nasional. Pada diagram EDS/M dalam Kaitannya dengan Penjaminan dan Peningkatan Mutu, terlihat alur informasi dan urutan kegiatannya. Informasi strategis hasil EDS/M ditindaklanjuti oleh Pengawas

Strategi Implementasi

Sekolah mengukur dampak dari berbagai kegiatan pentingnya terkait dengan peserta didik dan kegiatan pembelajaran (belajar mengajar); setiap tahun sekolah

juga memeriksa hasil dan dampak dari kegiatan belajar mengajar serta bagaimana sekolah dapat memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Hal yang sangat penting dalam proses ini adalah sekolah harus mempergunakan evaluasi ini untuk memprioritaskan bidang yang memerlukan peningkatan dan mempersiapkan rencana pengembangan/peningkatan sekolah. Proses ini kemudian menjadi bagian dari siklus pengembangan dan peningkatan yang berkelanjutan.



Gambar 2: Proses Siklus pengembangan dan peningkatan.

Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah (kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah, anggota masyarakat, dan pengawas sekolah) diharapkan bahwa tujuan dan nilai yang diinginkan dalam proses EDS/M menjadi bagian dari etos kerja sekolah. Penting diingat adalah bahwa informasi yang didapatkan harus dianggap penting dan tidak lagi dianggap sebagai beban atau hanya sekedar sebagai daftar data yang perlu dikumpulkan karena diminta oleh pihak luar. Proses EDS/M harus menjadi suatu refleksi untuk mengubah dan memperbaiki tata kerja, serta akan dianggap berhasil jika dapat membawa sekolah pada peningkatan pelayanan pendidikan dan hasilnya bagi para peserta didik. Kemudian sekolah akan menjadi pelaku utama dalam peningkatan mutu dan memberikan penjaminan terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) yang merupakan inti dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) di sekolah.

Metode Penelitian

Tahapan-tahapan berikut adalah upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan potret pendidikan Kalimantan Timur berbasis EDS/M.

A. Waktu dan tempat

Kegiatan dimulai dari persiapan dan pelaksanaan yang dimulai sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 bertempat di LPMP Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Samarinda Seberang.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan persiapan dan melaksanakan proses evaluasi diri sekolah dan madrasah.

1. Persiapan

Pelatihan ini dilaksanakan dengan mempergunakan sistem berikut ini:

- a. *Capacity Building* Internal terdiri dari Pengawas, Guru, Kepala Sekolah, Widyaiswara LPMP, dan Dosen Perguruan Tinggi sebanyak 40 Orang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret-2 April 2011 dilatih sebagai pendamping pengawas pelatih (*Trainers of Trainers/ToT*) bagi pengawas.
- b. *Capacity Building* Eksternal terdiri dari Pengawas sebanyak 50 Orang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei-29 Mei 2011 dilatih sebagai pelatih bagi pelatih (*Trainers of Trainers/ToT*) bagi Kepala Sekolah binaan.
- c. Sosialisasi EDS/M pada pemangku jabatan yang terdiri dari Kepala Seksi Kurikulum, kepala bidang Provinsi dan Kabupaten/kota pada tanggal 6 Juni 2011 dengan jumlah peserta 27 orang dari 14 kabupaten/kota.
- d. Workshop hasil EDS/M dan MSPD oleh Pengawas Kabupaten/Kota tanggal 24-28 September 2011 sebanyak 102 orang peserta.
- e. ToT kepala sekolah tentang RKS berbasis EDS/M pada tanggal 14-18 Oktober 2011 sebanyak 133 orang peserta.

2. Melaksanakan Proses Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah

Setelah pelaksanaan pelatihan, kepala sekolah dengan dukungan pengawas sekolah pembina melaksanakan EDS/M bersama Tim TPS yang terdiri dari perwakilan guru, komite sekolah, orang tua, Pengawas dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikutsertakan.

Tim ini akan mempergunakan instrumen yang disediakan untuk menetapkan profil kinerja sekolah berdasarkan indikator pencapaian. Informasi yang didapatkan kemudian dianalisa dan dipergunakan oleh TPS untuk mengidentifikasi kelebihan dan bidang perbaikan yang dibutuhkan, serta merencanakan program tahunan sekolah. Pengawas sekolah pembina harus dilibatkan secara penuh untuk mendukung sekolah dalam proses tersebut, serta dalam mengimplementasikan rencana perbaikan yang dikembangkan berdasarkan hasil dari proses ini.

C. Sasaran

Sasaran dalam kegiatan adalah sekolah-sekolah yang menjadi binaan pengawas yang telah dilatih pada *capacity building* yang terdiri dari 14 kabupaten/kota, pada satuan pendidikan SD, SMP/M.Ts, SMA/SMK/MA yang direncanakan berjumlah 500 sekolah, terpenuhi sejumlah 497 sekolah sedangkan 3 sekolah sampai pada batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyelesaikan laporan EDS/M ketiga 3 sekolah itu 1 SD dari Kabupaten Paser, 1 SMP dari Kukar dan 1 SMP dari Malinau secara rinci adalah sebagai berikut,

Tabel 1 Jumlah Sekolah Sasaran EDS/M menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Satuan Pendidikan			Jumlah
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/K/MA	
1.	Balikpapan	30	19	11	60
2.	Berau	20	10	10	40
3.	Bontang	20	10	10	40
4.	Bulungan	23	10	7	40
5.	Tanah Tidung	18	2	0	20
6.	Kutai Barat	0	10	10	20
7.	Kutai Kartanegara	5	34	20	59
8.	Kutai Timur	15	10	10	35
9.	Malinau	10	9	0	19
10.	Nunukan	10	4	6	20
11.	Paser	4	10	10	24
12.	PPU	6	9	5	20
13.	Samarinda	20	20	20	60
14.	Tarakan	10	11	19	40
Total		191	168	138	497

Teknik Pengumpulan dan Isian Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket/instrumen EDS/M yang telah disiapkan secara Nasional oleh, Instrumen EDS/M terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang dijabarkan ke dalam 26 komponen dan 62 indikator. Setiap standar terdiri atas sejumlah komponen yang mengacu pada masing-masing standar nasional pendidikan sebagai dasar bagi sekolah dalam memperoleh informasi kinerjanya yang bersifat kualitatif. Setiap komponen terdiri dari beberapa indikator yang memberikan gambaran lebih menyeluruh dari komponen yang dimaksudkan. Tahapan pengembangan ini memiliki makna sebagai berikut:

1. Tahap ke-1, belum memenuhi SPM (tidak memenuhi SNP).
2. Tahap ke-2, memenuhi SPM (belum memenuhi SNP).
3. Tahap ke-3, memenuhi SNP.
4. Tahap ke-4, melampaui SNP.

Teknik Analisis Data

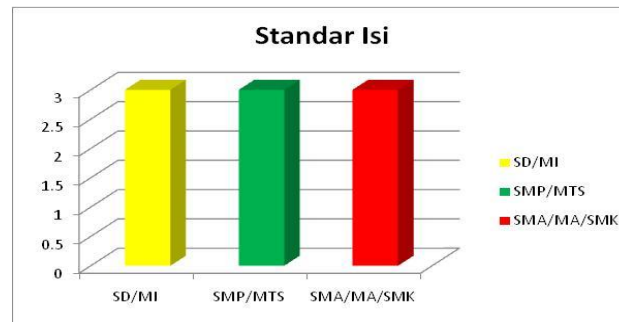
Analisis data yang digunakan dalam instrumen EDS/M dengan statistika deskriptif untuk menggambarkan kondisi dari setiap standar, komponen dan indikator yang ada melalui distribusi frekuensi, grafik dan sajian tabel dengan menekankan pada modus melalui persentase. Persentase yang ditunjukkan setiap standar didiskripsikan secara kualitatif untuk mendapatkan simpulan dari data terkumpul.

HASIL

Instrumen EDS/M yang terkumpul sebanyak 497 responden sekolah yang terdiri dari 191 sekolah dasar (SD, MI), 168 sekolah menengah pertama (SMP, M.Ts.) dan 138 sekolah menengah atas (SMA, SMK dan MA).

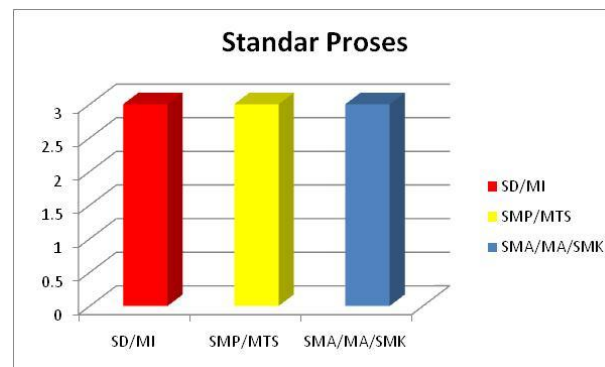
1. Gambaran Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur menurut SNP dan Jenjang

Satuan Pendidikan



Gambar 3: Standar Isi Jenjang SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA

Gambaran sekolah SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/SMK/MA pada standar isi telah mencapai tahap pengembangan 3 memenuhi SNP seperti dilihat pada gambar 3 di atas.



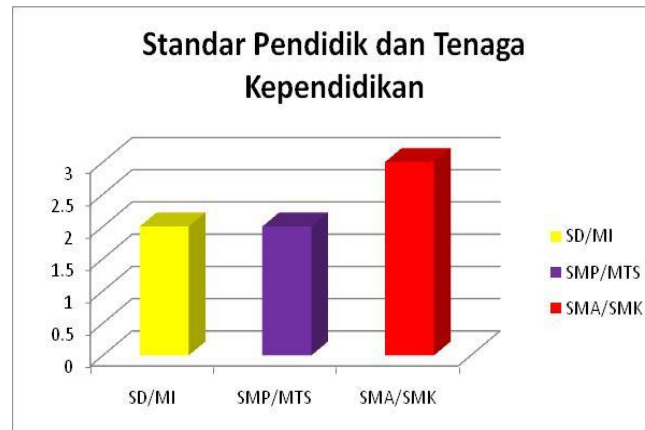
Gambar 4: Standar Proses Jenjang SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA telah mencapai tahap pengembangan 3 memenuhi SNP seperti dilihat pada gambar 4 di atas.



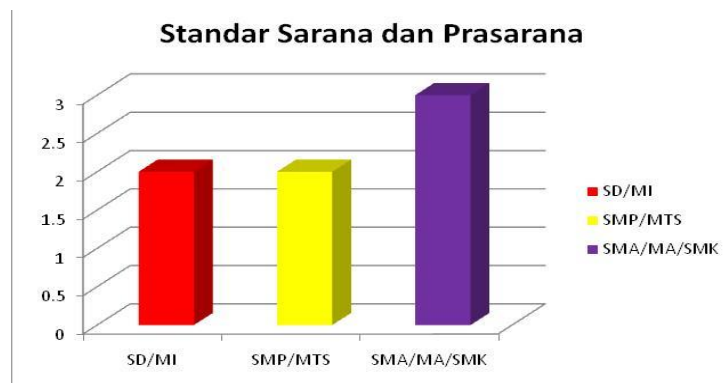
Gambar 5:
Standar Kompetensi Lulusan Jenjang D/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA

Gambaran sekolah SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/SMK/MA pada standar kompetensi lulusan telah mencapai tahap pengembangan 3 memenuhi SNP seperti dilihat pada gambar 5 di atas.

Gambaran sekolah SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/SMK/MA pada standar pendidik dan tenaga kependidikan telah mencapai tahap pengembangan 3 memenuhi SNP untuk SMA/SMK/MA, sedangkan untuk SD/MI dan SMP/M.Ts. masih pada tahap pengembangan 2 belum memenuhi standar nasional pendidikan seperti dilihat pada gambar 6 di bawah ini.



Gambar 6. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA

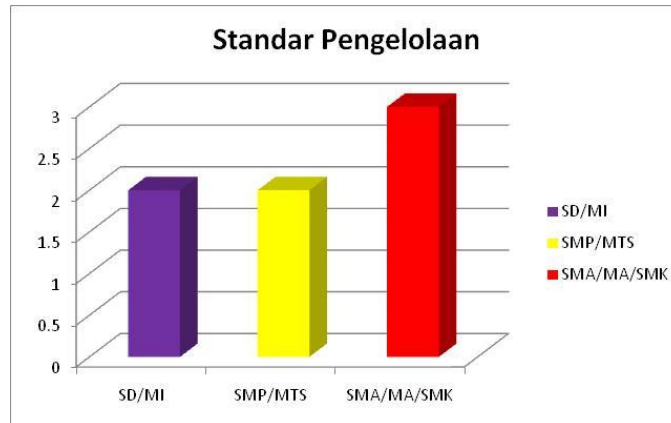


Gambar 7.

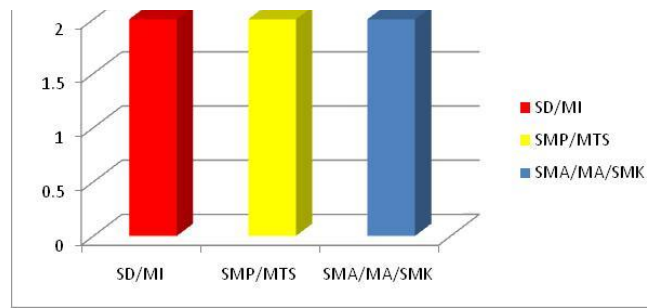
Standar Sarana dan Prasarana Jenjang SD/MI/SMP/MTs/ SMA/SMK/MA

Gambaran sekolah SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/SMK/MA pada standar sarana dan prasaran telah mencapai tahap pengembangan 3 memenuhi SNP untuk SMA/SMK/MA, sedangkan untuk SD/MI dan SMP/M.Ts. masih pada tahap pengembangan 2 belum memenuhi standar nasional pendidikan seperti dilihat pada gambar 7 di atas.

Gambaran sekolah SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/SMK/MA pada standar pengelolaan mencapai tahap pengembangan 3 memenuhi SNP untuk SMA/SMK/MA, sedangkan untuk SD/MI dan SMP/M.Ts. masih pada tahap pengembangan 2 belum memenuhi standar nasional pendidikan seperti dilihat pada gambar 8 di bawah ini.

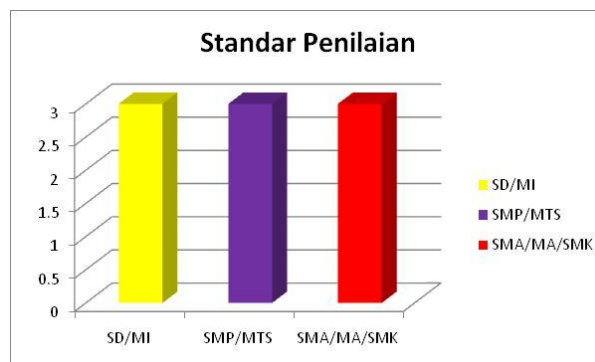


Gambar 8.
Standar Pengelolaan Jenjang SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA



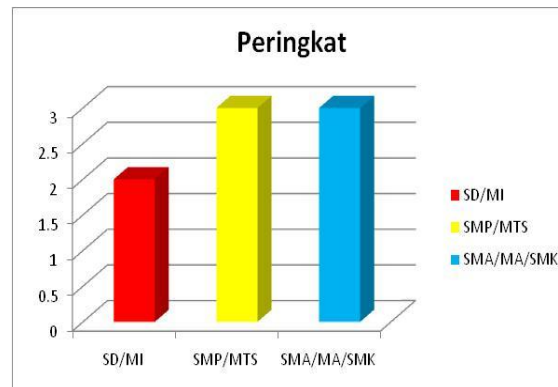
Gambar 9:
Standar Pembiayaan Jenjang SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA

Gambaran sekolah SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/SMK/MA pada standar pembiayaan tahap pengembangan 2 belum memenuhi SNP seperti dilihat pada gambar 9 di atas.



Gambar 10:
Standar Penilaian Jenjang SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA

Gambaran sekolah SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/SMK/MA pada standar penilaian telah mencapai tahap pengembangan 3 memenuhi SNP seperti dilihat pada gambar 10 di atas.



Gambar 11.

Peringkat Capaian Berdasarkan SNP Jenjang SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA

Gambaran umum dari sekolah SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/SMK/MA dapat dilihat pada gambar 9 di atas bahwa peringkat dari 8 standar SNP pendidikan di Kalimantan Timur dapat dijelaskan bahwa untuk SD/MI belum memenuhi SNP yang digariskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Pada jenjang SMP/M.Ts. dan SMA/SMK/MA memenuhi SNP seperti gambar 9.

PEMBAHASAN

Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan lampiran 1, 2 dan 3 capaian berdasarkan jenjang SD/MI, SMP/M.Ts., SMA/SMK/MA hasil EDS/M dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan bahwa, standar isi tahap pengembangan 3 memenuhi SNP (SD/MI, SMP/M.Ts. dan SMA/SMK/MA), standar proses tahap pengembangan 3 memenuhi SNP (SD/MI, SMP/M.Ts. dan SMA/SMK/MA), standar kompetensi lulusan tahap pengembangan 3 memenuhi SNP (SD/MI, SMP/M.Ts. dan SMA/SMK/MA), standar pendidik dan tenaga kependidikan tahap pengembangan 2 belum memenuhi SNP (SD/MI, dan SMP/M.Ts.), memenuhi SNP (SMA/SMK/MA), standar sarana prasarana tahap pengembangan 2 belum memenuhi SNP (SD/MI dan SMP/M.Ts), memenuhi SNP (SMA/SMK/MA), standar pengelolaan tahap pengembangan 2 belum memenuhi SNP (SD/MI dan SMP/M.Ts), memenuhi SNP (SMA/SMK/MA), standar pembiayaan tahap pengembangan 2 belum memenuhi SNP (SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/SMK/MA), standar penilaian tahap pengembangan 3 memenuhi SNP (SD/MI, SMP/M.Ts. dan SMA/SMK/MA).

Meskipun sudah pada tahap pengembangan 2 (SD/MI), 3 (SMP/M.Ts dan SMA/SMK/MA) perlu ditingkatkan berkelanjutan pada indikator-indikator yang

masih mencapai tahap 1 dan 2. Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dapat disusun berdasarkan capaian masing-masing standar dan menekankan pada indikator-indikator yang masih pada tahap pengembangan 1 dan 2. Berdasarkan gambaran EDS/M, grafik capaian menurut standar Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai peringkat 2 (cukup) untuk SD/MI dan 3 (baik) untuk jenjang lainnya, tetapi masih diperlukan perbaikan dan peningkatan tahap pengembangan 1 dan 2. yang belum memenuhi SNP.

Meningkatkan mutu kinerja sekolah, sekolah memerlukan perencanaan yang baik yang berdasarkan data dan informasi yang benar dan handal. Hasil EDS/M ini dikaji dan ditentukan prioritas dalam RPS/RKS berdasarkan keadaan dan kebutuhan nyata sekolah, baik untuk masa 4 tahun dalam RPS/RKS maupun untuk masa tahunan dalam RAPBS/RKAS.

Rekomendasi hasil EDS/M antara lain sekolah kegiatan workshop tentang pengembangan kurikulum berkarakter dengan mengembangkan 7 prinsip, penyusunan silabus dan RPP, meningkatkan kemampuan dan proses pembelajaran, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam ujian, pemerataan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan termasuk kualitas sesuai kualifikasi.

Kesimpulan

Bersadarkan hasil dan pembahasan maka dapat dijawab tujuan Potret Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur,

1. Kinerja Sekolah di Kalimantan Timur yang telah memenuhi standar SNP terdapat pada jenjang SMP/M.Ts dan SMA/SMK/MA, sedangkan pada jenjang SD/MI belum memenuhi SNP atau baru pada tahap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
2. Tahapan pengembangan dalam pencapaian SPM dan SNP pendidikan di Kalimantan Timur telah mencapai tahapan 3 kecuali SD/MI masih pada tahap pengembangan 2. Menurut Kabupaten/kota potret pendidikan yang berada pada tahap pengembangan 2 belum memenuhi SNP adalah Kabupaten Berau, Tana Tidung dan Malinau jenjang SD/MI, Kabupaten Tana Tidung, Kutai Barat, Kutai Timur dan Malinau untuk SMP/M.Ts. dan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara untuk SMA/SMK/MA.
3. Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) disusun sesuai kebutuhan nyata, untuk SD/MI RKSnya menitik beratkan pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Jenjang SMP/M.Ts. standar pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan dan pembiayaan. Selanjutnya pada jenjang SMA/SMK/MA RKSnya dititik beratkan pada standar pembiayaan.
4. Potret pendidikan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan 8 SNP sudah pada tahap 3 atau memenuhi SNP, tahap ini terdapat pada jenjang SMP/M.Ts. dan SMA/SMK/MA, pada tahap pengembangan 2 atau belum memenuhi SNP terdapat pada jenjang SD/MI, sedangkan menurut Kabupaten/kota masih terdapat sebagian kabupaten/kota yang belum memenuhi SNP atau baru memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

DAFTAR PUSTAKA

- TIM**, 2011, *Panduan Teknis Evaluasi Diri Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.
- TIM**, 2011, *Panduan Teknis Monitoring Sekolah Oleh Pemerintah Daerah (MSPD)*, Jakarta: Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005** tentang *Guru dan Dosen*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005** tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007** tentang *Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009** tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010** tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010** tentang *Standar Pelayanan Minimal*.
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010** tentang *Akselerasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*.